

***SOCIAL IMPLICATIONS OF FORCED DISPLACEMENT
VILLAGE COMMUNITIES IN BUNDUNG LAUT (CASE STUDIES OF
INTERNATIONAL PORT KIJING DEVELOPMENT***

**IMPLIKASI SOSIAL AKIBAT PEMINDAHAN PAKSA
MASYARAKAT DESA BUNDUNG LAUT (STUDI KASUS
PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING)**

Nurul Adha^{1*}, Margaretha Andriani AP², Marini³, Viktorius Heronimus⁴, S Visi Ananda⁵, Sopia Bagassidi⁶

^{1,3}Universitas Tanjungpura, Indonesia

Email Correspondence: @e1021211086@student.untan.ac.id

ABSTRACT:

Migration can be divided into two, namely voluntary migration and forced migration. In forced migration, there is a migration that is difficult to calculate, namely forced migration due to development. In Indonesia itself, especially in West Kalimantan, there is a port development called the Kijing International Port in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, West Kalimantan. Therefore, this study aims to determine what are the social implications due to the forced displacement of the Bundung Laut Village community in the construction of the Kijing International Port. The theory used is the Harrell-Bond and Voutira comparative perspective theory which says that the consequence of forced migration is poverty. Researchers chose to use a qualitative approach in this study by interviewing informants who were affected communities and determined through purposive sampling. The results showed that the Kijing Port Development had an impact, both in the economic, socio-cultural and educational fields. In the economic field, this development resulted in forced displacement related to the conversion of land used for port development so that people lost their homes and limited sources of livelihood, especially those experienced by traditional fishermen. In the socio-cultural field, the impact of the development is the change in people's behavior to become consumptive. While in the field of education is expected to increase through CSR from PT Pelindo which provides scholarships for orphans and outstanding children..

Keywords: Development, Forced Migration, Kijing International Port, Social Implications.

ABSTRAK:

Migrasi dibedakan menjadi dua yakni migrasi sukarela dan migrasi paksa. Dalam migrasi paksa terdapat migrasi yang sulit dihitung yakni migrasi paksa akibat pembangunan. Di Indonesia sendiri terutama di Kalimantan Barat terdapat pembangunan pelabuhan yang bernama Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja implikasi sosial akibat pemindahan paksa masyarakat Desa Bundung Laut dalam pembangunan Internasional Pantai Kijing. Teori yang digunakan adalah teori perspektif komparatif Harrell-Bond dan Voutira yang mengatakan bahwa konsekuensi dari migrasi paksa adalah kemiskinan. Peneliti memilih menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan metode wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat terdampak dan ditentukan melalui melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan Pelabuhan Kijing menimbulkan dampak, baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Di bidang ekonomi, pembangunan ini mengakibatkan pemindahan paksa terkait dengan alih fungsi lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan sehingga masyarakat kehilangan tempat tinggal dan terbatasnya sumber mata pencaharian terutama yang dialami oleh nelayan-nelayan tradisional. Di bidang sosial budaya dampak dari pembangunan tersebut yakni perubahan perilaku masyarakat menjadi konsumtif. Sedangkan di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkat dengan melalui CSR dari PT Pelindo yang memberikan beasiswa bagi anak yatim dan anak berprestasi.

Kata Kunci: Implikasi Sosial, Migrasi Paksa, Pembangunan, Pelabuhan Internasional

Article Info

Received	:	May 2023
Accepted	:	July 2023
Published	:	July 2023
DOI	:	

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Migrasi dipengaruhi dengan berbagai ciri-ciri seperti ekonomi, sosial, pendidikan maupun kondisi demografi. Migrasi dibedakan menjadi dua yakni migrasi sukarela dan migrasi paksa. Dalam migrasi paksa terdapat migrasi yang sulit dihitung yakni migrasi akibat pembangunan. Dalam buku *Risks and Reconstruction Experiences of Resettlers and Refugees* menjelaskan bahwa pembangunan yang menimbulkan migrasi paksa seperti pembangunan bendungan, bandara, jalan raya perumahan mewah, kawasan konservasi, dan taman bermain (Cernea, 1997). Roy (dalam Mahadika, 2020) menegaskan, biasanya yang mengalami kerugian demi kepentingan nasional tersebut ialah penduduk pedesaan, etnis minoritas, dan penduduk asli di daerah pembangunan. Sedangkan para elit maupun pihak perusahaan diuntungkan.

Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan melibatkan hubungan antara agen pembangunan dan sasaran utama dalam pembangunan yakni masyarakat sebagai penerima. Agen pembangunan disini memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan program dan kebijakan dalam pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan apabila program dan kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat bertanggungjawab untuk menerima program dan kebijakan tersebut. Maka dari itu, pembangunan suatu infrastruktur yang berdampak kepada masyarakat luas harus memperhatikan berbagai aspek dan persetujuan masyarakat tersebut.

Menurut Purnomo, ada tiga unsur dalam pembangunan yang tidak hanya dilihat dari segi pembangunan ekonomi saja. Tiga unsur tersebut adalah keseimbangan ekonomi, keseimbangan sosial dan keseimbangan lingkungan serta harus menciptakan kondisi pembangunan yang dapat meminimalisir atau bahkan mencegah konflik dalam proses pembangunan tersebut. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dapat menimbulkan migrasi paksa yakni pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan merupakan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan cukup luas sehingga harus menggusur sumber daya alam sekitar dan mengharuskan pemindahan masyarakat (Mahadika, 2020). Cernea mengidentifikasi bentuk-bentuk kerugian yang dialami warga yang menjadi korban pemindahan paksa. Bentuk-bentuk kerugian tersebut antara lain, kehilangan tanah dan bangunan, kehilangan pekerjaan, menurunnya ikatan sosial pada masyarakat, kerawanan pangan dan kesehatan masyarakat serta terganggunya artikulasi sosial (Cernea, 1997).

Di Indonesia sendiri terutama di Kalimantan Barat terdapat pembangunan pelabuhan yang bernama Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Pelabuhan Kijing sangat berperan penting dalam meningkatkan kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global (Muharrami, 2022). Saprinah (dalam Mahadika, 2020) menjelaskan bahwa Pembangunan Pelabuhan Kijing berpotensi akan terjadinya konflik seperti kerugian dan ketidakadilan pada masyarakat serta menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan karena membutuhkan lahan yang cukup luas. Menurut saprinah, dalam proyek pembangunan memang objek yang dikorbankan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur adalah masyarakat dan lingkungan.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Novenanto, 2019) yang berjudul “Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas dampak sosial ekonomi yang disebabkan dari pemindahan paksa pasca adanya luapan lumpur lapindo di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan dari adanya pemindahan paksa yang dialami penduduk berdampak pada kehilangan berbagai akses seperti bangunan dan tanah, kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan publik, perubahan pekerjaan, dan menurunnya ikatan sosial diantara masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif namun hanya terfokus pada survei kuesioner yang membahas tentang dampak Sosial-Ekonomi namun tidak membahas adanya dampak perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Mahadika, 2020) berjudul “Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang bertujuan untuk menganalisis konflik sosial yang muncul akibat adanya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya kerusakan pemukiman warga yang rusak diakibatkan oleh pembangunan pelabuhan, kompensasi yang tidak sesuai, dan adanya potensi kehilangan pekerjaan. Penelitian ini hanya membahas mengenai analisis konflik sosial yang terjadi akibat dari pembangunan pelabuhan Internasional Kijing, dan tidak membahas mengenai dampak baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Kemudian terdapat pula penelitian, oleh (Wijayanto et al., 2017) dengan judul “Perubahan Mata Pencaharian dan Proses Adaptasi Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede”, Penelitian ini membahas tentang pembangunan waduk Jatigede yang telah menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak (WMT) yaitu kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Sebagian besar warga yang terdampak pembangunan waduk bekerja sebagai petani dan meskipun pembangunan Waduk Jatigede telah selesai, mereka tetap ingin berencana bekerja lagi di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan pertanian adalah mata pencaharian yang mereka geluti sejak lama dan mereka tidak memiliki keterampilan serta keahlian diluar bidang pertanian, pada penelitian ini menjelaskan bagaimana proses adaptasi masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede.

Penelitian ini penting karena mengembangkan aspek aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam penelitian serta belum adanya penelitian terdahulu yang membahas terkait implikasi sosial akibat dari pemindahan paksa dari berbagai aspek. sehingga dapat di jadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. Terdapat lima desa yang terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, namun desa bundung laut merupakan desa yang paling besar terkena dampak pembangunan tersebut. Sehingga peneliti memilih desa Bundung Laut sebagai lokasi penelitian. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja implikasi sosial akibat pemindahan paksa masyarakat Desa Bundung Laut dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Pantai Kijing dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam buku Moh Nazir mengatakan bahwa pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan mengidentifikasi peristiwa dengan interpretasi yang tepat untuk mengenali fenomena dan menggambarkan karakteristik dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang terjadi (Nazir, 1999). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara peneliti langsung turun ke lapangan dengan mewawancarai masyarakat terdampak pembangunan pelabuhan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait implikasi sosial akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Adapun penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dan tempat penelitian berdasarkan kriteria yang diinginkan agar mendapatkan informasi sesuai dengan sebuah fenomena yang akan diteliti (Creswell, 2015). Informan pada wawancara ini yaitu: 1) Masyarakat yang terkena dampak penggusuran 2) Nelayan 3) Pemangku kepentingan masyarakat. Pemilihan informan tersebut berdasarkan informan yang paling merasakan dampak dari pembangunan pelabuhan, dalam penelitian ini menguraikan berbagai data hasil wawancara dan dibuat kesimpulan terkait Implikasi Sosial Masyarakat Desa Bundung Laut akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pembangunan Pelabuhan Internasional dibangun di daerah pantai Kijing yang mana daerah ini sesuai dengan kriteria sehingga ditetapkan sebagai pelabuhan dan mempunyai pelindung yaitu pulau Temajok dan pulau Kijing yang kedalamannya sekitar 12-15 meter hingga kapal besar bisa masuk sehingga dari sisi geografis pelabuhan Kijing cukup strategis. Perencanaan untuk pembangunan pelabuhan ini sudah ada sejak lama namun hal tersebut dapat direalisasikan setelah Jokowi menjadi presiden. Berdasarkan studi kelayakan pelabuhan ini berada di Selat Karimata, yang menjadi penghubung Sumatera dan Kalimantan. Posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut China Selatan. Adapun wacananya yaitu terbangun pusat *smelter*, aspal, distribusi CPO, dan *transshipment* bahan bakar (Indonesia.go.id, 2019). Pembangunan pelabuhan ini dinilai dapat meningkatkan perkonomian negara, namun terdapat dampak-dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan Pelabuhan, hal ini diperkuat pula dengan wawancara langsung dengan banyak informan.

Menurut Kepala Desa Sungai Bundung Laut, bahwa ada 5 desa yang terdampak pembangunan pelabuhan. Desa Bundung Laut merupakan desa yang paling banyak terkena dampak, mayoritas penduduk Desa Bundung Laut bekerja sebagai petani, kebun, serta nelayan. Dari segi mata pencarian masyarakat tidak banyak yang berubah, tetapi dari segi penghasilan mengalami penurunan, misalnya lahan pertanian dan perkebunan yang digusur untuk pembangunan pelabuhan kemudian dipindahkan dan harus ditanam kembali mulai dari nol yang mengakibatkan cukup memakan waktu dalam prosesnya. Adapun untuk para nelayan, daerah tangkapan mereka dipindahkan ke area yang jauh lebih dan berdampak pada hasil tangkapannya yang sedikit. Selanjutnya, Kepala Desa Bundung laut menyatakan pada saat perjanjian pembebasan lahan, masyarakat banyak yang setuju daripada tidak setuju, hal ini dikarenakan PT Pelindo banyak menjanjikan uang ganti rugi namun ketika pembangunan sudah berlangsung, masyarakat memang mendapatkan uang ganti rugi tersebut, misalnya masyarakat yang rumahnya dipindahkan secara paksa, kemudian uang ganti rugi tersebut mereka gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang seadanya karena uang belum tercukupi untuk menggantikan rumah seperti sebelumnya namun ada juga masyarakat yang tidak memanfaatkan uang ganti rugi dengan baik. Masyarakat semakin berperilaku konsumtif dan lebih memilih menggunakan uang tersebut, misalnya untuk membeli mobil. PT Pelindo juga mengganti rugi fasilitas umum yang telah digusur seperti kantor desa, masjid, Bank BPD, dan pemakaman nenek moyang yang akan dipindahkan namun sampai sekarang belum terealisasikan. Adapun kantor desa dan Bank BPD menggunakan dana dari PT Pelindo atas gambaran dari Kepala Desa, sedangkan untuk masjid, pembangunannya masih belum rampung karena kekurangan dana.

Keterlibatan dan keluhan masyarakat dalam pembangunan pelabuhan ini juga harus diperhatikan, karena masyarakat yang secara langsung juga merasakan dampaknya terutama masyarakat kecil yang bekerja sebagai nelayan, salah satunya nelayan. Nelayan pasir mengatakan bahwa aktivitas mencari pasir kerang sedikit terganggu dengan adanya pembangunan pelabuhan ini karena wilayahnya dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari tempat tinggal dan hasil tangkapan juga sedikit sehingga para nelayan masih menangkap ikan di

wilayah pelabuhan meskipun terkadang diusir dan tempatnya dibatasi oleh pihak PT Pelindo, dan hal ini berdampak pada hasil tangkapan yang sedikit karena tempatnya terbatas. Dulunya nelayan pasir bisa mendapatkan 1 truk pasir yang bisa dikirim ke Kota Pontianak namun sekarang hanya dapat menjual di sekitaran desa saja karena masyarakat juga masih menggunakannya untuk menjernihkan air di rumah. Adapun nelayan ikan juga mengeluhkan hal yang sama, para nelayan kecil tidak diganti rugi oleh pihak PT Pelindo mereka hanya mengganti rugi dengan nelayan yang memiliki alat tangkap seperti sero dan bagan saja, berbeda dengan nelayan kecil yang hanya menggunakan jala dan pukat untuk menangkap ikan, mereka juga dibatasi untuk mencari ikan dan area tangkapan dipindahkan ke wilayah Desa Kuala yang jaraknya 28 km dari Desa Bundung Laut.

Dari berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. PT Pelindo juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat, contohnya melakukan CSR. Kepala desa Bundung Laut mengatakan bahwa CSR dari PT Pelindo yaitu seperti membagi sembako setiap setahun sekali, memberikan kurban untuk hari raya dan beasiswa berprestasi untuk anak yatim. Menurut kepala desa Bundng Laut PT Pelindo bertanggung jawab hanya saja ada beberapa janji yang tidak ditepati seperti memberikan perhatian bagi masyarakat yang terdampak, mempermudah pembuatan sertifikat tanah dan akses jalan. Ada beberapa hal yang dilakukan pihak desa untuk meningkatkan perekonomian warganya, seperti yang dikatakan oleh kepala desa Bundung Laut bahwa untuk nelayan yang terdampak melalui forum desa dibuatlah kerambak udang, kepiting, ikan nila dan ikan lele namun nelayan di desa Bundung Laut keahliannya adalah menangkap bukan membudidaya, ini juga sama halnya dengan pelatihan sablon yang dilakukan oleh PT Pelindo sehingga pelatihan tersebut kurang efektif karena kemampuan mereka tidak ada sama sekali dibidang itu meskipun sudah diberi pelatihan.

Berikut ini adalah implikasi sosial akibat migrasi paksa pembangunan antara lain:

3.1. Implikasi Sosial di bidang ekonomi

Teori perspektif komparatif Harrell-Bond dan Voutira yang mengatakan bahwa konsekuensi dari migrasi paksa adalah kemiskinan (Cernea & Dowell, 2000). Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan dasar yakni makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Kemiskinan yang ditimbulkan akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing disebabkan oleh hilangnya mata pencaharian masyarakat seperti petani yang wilayah pertaniannya dipindahkan, menurunnya pendapatan terutama bagi nelayan yang dibatasi untuk menangkap ikan ataupun wilayah tangkapannya dipindahkan ke wilayah lain. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, masyarakat Kecamatan Sungai Kuyit pada umumnya bermata pencarian sebagai wiraswasta dengan presentase 15,81% sedangkan yang bermata pencaharian sebagai nelayan dengan presentase 2,98%. Terdapat 62 nelayan kelong dan 49 nelayan togo yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing (Angah, 2019). Dampak tersebut berpengaruh pada sulitnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan. Selanjutnya sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar tampak pada masyarakat yang dipindahkan secara paksa. Mereka hanya membangun rumah seadanya menggunakan uang ganti rugi lahan dari PT Pelindo yang bahkan uang ganti rugi tersebut juga digunakan untuk membuka lahan pertanian maupun membuka usaha lainnya.

3.2. Implikasi Sosial di bidang Budaya

Implikasi Sosial di bidang budaya tampak pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku adalah salah satunya paradigma yang diubah seseorang sesuai dengan apa yang dia pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat, atau dirinya sendiri (Irwan, 2007). Perubahan perilaku masyarakat desa Bundung Laut tampak pada perilaku mereka yang konsumtif memanfaatkan uang ganti rugi perusahaan PT Pelindo. Beberapa masyarakat lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil daripada membangun usaha untuk beralih pekerjaan yang sesuai untuk beradaptasi pada pembangunan pelabuhan Kijing ini. Kepala desa Bundung Laut juga menilai bahwa perilaku masyarakatnya tidak kreatif untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan diluar bidang mereka, hal ini karena sejak dahulu mereka bermata pencarian sebagai nelayan dan petani sehingga apapun pemberdayaan yang diberikan oleh PT Pelindo maupun dari pihak desa seperti pelatihan membuat sablon, kerambak udang, kepiting, ikan nila dan ikan lele tidak dijalankan secara efektif. Karena masyarakatnya tidak kreatif untuk beradaptasi dengan kejadian yang ada.

3.3. Implikasi Sosial di bidang pendidikan

Implikasi sosial di bidang pendidikan terlihat dalam implementasi program CSR PT Pelindo. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga hal tersebut merupakan komitmen perseroan untuk turut berperan agar meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat luas (Widjaja & Yeremia, 2008). Program CSR PT Pelindo di bidang pendidikan yakni pemberian beasiswa berupa uang kepada anak yatim dan anak yang berprestasi bagi masyarakat yang terdampak karena kecilnya pendapatan dan berkurangnya pendapatan yang di peroleh menjadi hambatan untuk mereka dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini juga merupakan dampak positif dari pembangunan

Pelabuhan Internasional Kijing karena dinilai dapat meningkatkan minat belajar siswa dan pendidikan anak-anak di desa Bundung Laut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah kami lakukan, Desa Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah merupakan desa yang paling banyak terkena pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, terdapat implikasi sosial pada bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Implikasi sosial pada bidang ekonomi yaitu adanya pembangunan pelabuhan mengakibatkan hilangnya mata pencarian serta pekerjaan dan berkurangnya pendapatan, pada bidang sosial budaya mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat menjadi konsumtif dan kurang kreatif dalam beradaptasi, kemudian implikasi pada bidang pendidikan yaitu PT Pelindo menjalankan program CSR seperti pemberian beasiswa berupa uang kepada anak yatim dan anak berprestasi yang terdampak pembangunan pelabuhan. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan penelitian pada aspek lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya pada bidang kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Angah. (2019). *Nelayan Tuntut Ganti Rugi Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-413419-millennials-nelayan-tuntut-ganti-rugi-pembangunan-pelabuhan-internasional-kijing.html>
- Cernea, M. . (1997). The Risks and Reconstruction Model for Resettling Displaced Populations. *World Development*, 125(10).
- Cernea, M. M., & Dowell, M. (2000). *Risk and Reconstruction Experiences of Resettlers and Refugees*. The World Bank.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Belajar. In *Pustaka Belajar*.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kota Kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12.
- Indonesia.go.id. (2019). *Pelabuhan Kijing Calon Gerbang Ekspor Impor di Kalimantan*. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1085/pelabuhan-kijing-calon-gerbang-ekspor-impor-di-kalimantan>
- Irwan. (2007). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. CV. Absolute Media.
- Mahadika, A. (2020). Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu Ilmu Sosial*, 4(2), 101–107.
- Muharrami, N. S. . (2022). *TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK AKAN DUKUNG HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI DI KALIMANTAN BARAT*. Kalbarprov.Go.Id. <https://kalbarprov.go.id/berita/terminal-kijing-pelabuhan-pontianak-akan-dukung-hilirisasi-dan-industrialisasi-di-kalimantan-barat.html>
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Novenanto, A. (2019). Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 21(3).
- Widjaja, G., & Yeremia, A. . (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis P*. Forum Sahabat.
- Wijayanto, V., Suwartapradja, & Hernawati, O. R. (2017). Perubahan Mata Pencarian dan Proses Adaptasi Warga Karena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. *Indonesian Journal Anthropology*, 2(2).